

IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFIZIYAH

Rahmad Ramadhani

Universitas Islam Negeri Raden Intan,
Lampung
dhaniarama3736@gmail.com

Maimun

Universitas Islam Negeri Raden Intan,
Lampung
maimun@radenintan.ac.id

Rudi Santoso

Universitas Islam Negeri Raden Intan,
Lampung
rudisantoso@radenintan.ac.id

Abstract: *Tourism plays a vital role in Indonesia's economy, society, and culture. Central Lampung has potential for natural, man-made, and cultural tourism. The Youth, Sports, and Tourism Office, as mandated by Article 8 of Central Lampung Regent Regulation Number 11 of 2023 concerning Detailed Duties and Functions of Structural Positions and Substantive Groups of the Youth, Sports, and Tourism Office of Central Lampung Regency, is tasked with developing tourism destinations, institutions, and businesses. This study examines the perspective of siyāsah tanfiziyyah (legality) regarding the implementation of Article 8 of Central Lampung Regent Regulation Number 11 of 2023 concerning Detailed Duties and Functions of Structural Positions and Substantive Groups of the Youth, Sports, and Tourism Office of Central Lampung Regency by the Central Lampung Tourism and Culture Office. The results suggest that the implementation of Article 8 of Central Lampung Regent Regulation Number 11 of 2023 concerning Detailed Duties and Functions of Structural Positions and Substantive Groups of the Youth, Sports, and Tourism Office of Central Lampung Regency does not fully align with the principles of siyāsah tanfiziyyah. Although the division of tasks is structurally clear, implementation still faces significant obstacles in the form of budget constraints, a lack of specialized human resources, minimal use of information technology, and low community participation in maintaining the sustainability of tourist attractions.*

Keywords: *Siyāsah Tanfiziyyah, Regulations, Tourism Development.*

Abstrak: Pariwisata berperan penting dalam ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Lampung Tengah memiliki potensi wisata alam, buatan, dan budaya. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata bertugas sesuai Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah untuk mengembangkan destinasi, kelembagaan, dan usaha pariwisata. Penelitian ini mengkaji mengenai perspektif *siyāsah tanfiziyyah* mengenai implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian mengemukakan bahwa implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāsah tanfiziyyah*. Meskipun secara struktural pembagian tugas telah jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan berupa keterbatasan anggaran, kurangnya SDM berkompetensi khusus, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan objek wisata.

Kata kunci: *Siyāsah Tanfiziyyah, Peraturan, Pengembangan Pariwisata.*

Pendahuluan

Pariwisata di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi nyata terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Melalui sektor ini, terbuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat yang memiliki keterampilan di bidang pariwisata, peningkatan pendapatan negara melalui pajak dan devisa, serta perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang terlibat di dalamnya. Selain itu, sektor pariwisata juga berperan dalam memperkenalkan dan meningkatkan apresiasi terhadap kebudayaan bangsa. Dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang optimal, suatu daerah dapat menjadi destinasi menarik bagi wisatawan (Al Anang & Ismah, 2022). Oleh karena itu, pemerintah di berbagai daerah terus berupaya meningkatkan kualitas

sarana dan prasarana demi memenuhi kebutuhan wisatawan dan memperkuat daya tarik pariwisata.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan kebudayaan yang dapat menjadi pilar penting bagi pengembangan ekonomi daerah. Wilayah ini memiliki kekayaan alam yang mempesona, seperti air terjun, danau, serta panorama alam yang masih asri dan terjaga. Keindahan tersebut membuka peluang besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata alam unggulan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Beberapa destinasi wisata yang menarik antara lain Danau Biru Tambang Batu Kapur, Curug Tujuh Putri, Bukit Batu Bara, Kampung Adat Pubian, Festival Budaya Lampung Tengah, Agrowisata Kampung Bekri, serta Kebun Kopi dan Kakao di Kecamatan Anak Tuha.

Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian dengan Bapak Donovan Efrando, S.E., selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, selain potensi alam yang melimpah, daerah ini juga memiliki kekayaan budaya yang mencerminkan identitas masyarakat adat Lampung. Tradisi dan kesenian seperti Tari Cangget, serta kerajinan tangan khas seperti sulam usus dan tapis Lampung menjadi wujud nyata kearifan lokal yang memiliki nilai estetika sekaligus nilai ekonomi. Kegiatan budaya dan seni tersebut bukan hanya menjadi sarana pelestarian warisan budaya, tetapi juga dapat menjadi daya tarik wisata melalui penyelenggaraan festival dan event budaya daerah.

Namun demikian, hasil observasi pra-penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan kebudayaan di Lampung Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan utama terletak pada kurangnya promosi wisata, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta minimnya kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Selain itu, inovasi dalam pengemasan produk wisata budaya masih belum optimal, sehingga daya tarik terhadap wisatawan belum maksimal.

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah sebagai instansi pemerintah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata memiliki tanggung jawab besar dalam pengembangan serta pemasaran objek wisata dan warisan budaya daerah. Peran dinas ini sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan

Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah memuat rincian tugas dan fungsi jabatan struktural serta kelompok substansi di berbagai perangkat daerah, termasuk Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah. Khususnya, Pasal 8 dalam peraturan tersebut mengatur secara rinci peran dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing jabatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan profesional. Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah menjelaskan bahwa: *“Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam, buatan dan budaya.”*

Implementasi dari regulasi ini menjadi penting untuk dikaji mengingat sektor pariwisata dan kebudayaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah, memperkuat identitas lokal, serta mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan tugas di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada sejauh mana aturan tersebut dijalankan dengan baik di lapangan.

Siyāsah tanfīziyah merupakan sebuah konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan oleh pemimpin atau pemerintah. Implementasi kebijakan publik harus mencerminkan prinsip keadilan, kesejahteraan umum (*maslahah*), serta ketertiban administratif sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisa' ayat 58: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”* (QS. An-Nisa (4) : 58)

Ayat ini menjadi landasan bagi pemimpin atau pemerintah untuk selalu mengedepankan keadilan dalam setiap kebijakan publik. Prinsip keadilan ini juga bersinergi dengan tujuan *siyāsah syar'iyah* yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). (Yunus, 2023, p. 98)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata terkait hambatan dan solusi dalam penerapan kebijakan, serta menawarkan perspektif baru yang mengaitkan antara hukum positif dan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola pemerintahan daerah. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 dalam Perspektif *Siyāṣah Tanfīziyah*.”

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari sumbernya di lokasi atau tempat terjadinya fenomena yang diteliti. Peneliti turun ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, atau pengumpulan dokumen yang relevan, sehingga data yang diperoleh bersifat faktual, aktual, dan kontekstual sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. (Sugiyono, 2021, p. 11)

Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu 1 orang Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata, 1 orang Kepala Bidang Pengembangan Dan Pemasaran Pariwisata, 1 orang Staff Analisis Pariwisata, 2 orang Staf Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Peraturan Bupati Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki potensi pariwisata beragam, mencakup wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata religi. Wilayah ini berada di jantung Pulau Sumatera bagian selatan, sehingga memiliki posisi strategis sebagai penghubung jalur lintas Sumatera yang memudahkan akses wisatawan dari berbagai daerah.

Lampung Tengah menyimpan berbagai objek wisata alam yang menarik, seperti Air Terjun Curup Tujuh di Kecamatan Sendang Agung, yang memiliki pemandangan asri dan udara sejuk. Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak, menjadi destinasi

memancing dan rekreasi air. Bentang persawahan dan perkebunan yang potensial dikembangkan sebagai agrowisata. Wisata alam di Lampung Tengah umumnya masih alami, namun sebagian besar belum dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai sehingga perlu sentuhan pengelolaan profesional.

Lampung Tengah merupakan daerah yang kaya tradisi, khususnya budaya Lampung Pepadun. Beberapa daya tarik budaya antara lain Festival Begawi Adat Lampung, yang menampilkan prosesi adat, tari tradisional, dan musik khas Lampung. Upacara Cakak Pepadun, tradisi pengukuhan gelar adat bagi tokoh masyarakat. Kerajinan kain tapis dan sulam usus yang menjadi warisan budaya lokal. Kegiatan budaya ini berpotensi menjadi atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara, terutama jika dikemas dalam event tahunan dengan promosi yang kuat.

Lampung Tengah memiliki sejumlah wisata buatan yang terus berkembang, antara lain Waterpark Seputih Raman sebagai sarana rekreasi keluarga. Taman Asri Kota Gajah yang menjadi ruang terbuka publik untuk bersantai dan berolahraga. Wisata buatan ini menjadi pilihan masyarakat lokal untuk berlibur tanpa harus bepergian jauh ke luar daerah. Selain wisata alam dan budaya, Lampung Tengah juga memiliki wisata religi yang cukup terkenal, seperti Masjid Istiqlal Bandar Jaya, salah satu masjid terbesar di provinsi yang menjadi ikon kota. Makam-makam keramat yang menjadi tujuan ziarah sebagian masyarakat. Wisata religi di Lampung Tengah masih bersifat lokal, namun memiliki potensi dikembangkan dengan konsep wisata religi terpadu.

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah merupakan Instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang kebudayaan dan pariwisata yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemasaran objek wisata dan kebudayaan, dimana peranannya sangat penting bagi sektor pariwisata karena mendukung perkembangan perekonomian Indonesia.

Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah memuat rincian tugas dan fungsi jabatan struktural serta kelompok substansi di berbagai perangkat daerah, termasuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Tengah. Khususnya, Pasal 8 dalam peraturan tersebut mengatur secara rinci peran dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing jabatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan profesional. Pasal 8

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah menjelaskan bahwa: *“Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, monitoring usaha pariwisata serta pengembangan sumber daya wisata alam, buatan dan budaya.”*

Menurut hasil penelitian, tugas dan fungsi jabatan struktural serta kelompok substansi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah meliputi penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pemberian fasilitas, pemantauan dan evaluasi kerja sama, serta monitoring usaha pariwisata. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata berfokus pada perencanaan strategis, pembinaan kelembagaan, dan pengembangan objek wisata, sedangkan Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata menangani promosi, kalender event, dan branding daerah. Staf Analisis Pariwisata mengumpulkan dan menganalisis data sebagai dasar kebijakan, sementara Staf Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda mengembangkan produk wisata berbasis budaya lokal, melatih pelaku usaha, serta memfasilitasi kegiatan ekonomi kreatif.

Koordinasi dilakukan melalui rapat rutin, komunikasi lintas bidang, dan kerja sama dengan pihak swasta maupun masyarakat. Fasilitas yang diberikan meliputi sarana perkantoran, perangkat teknologi informasi, kendaraan dinas, jaringan komunikasi, serta dukungan anggaran dari APBD. Pemantauan usaha pariwisata mencakup peninjauan lapangan, evaluasi operasional, pembinaan pelaku usaha, dan pengembangan wisata alam, buatan, serta budaya.

Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya SDM berkompetensi khusus, minimnya pelatihan pemasaran digital, keterbatasan peralatan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga objek wisata. Kendala eksternal mencakup infrastruktur yang belum memadai, cuaca, dan aksesibilitas terbatas. Upaya mengatasinya dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan kolaborasi lintas sektor agar pengembangan pariwisata dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 pada Dinas Pemuda, Olahraga,

dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Secara struktural, pembagian tugas dan fungsi pada setiap bidang maupun kelompok substansi telah dilaksanakan sesuai peraturan, mulai dari penyusunan kebijakan teknis, koordinasi lintas pihak, fasilitasi sarana prasarana, hingga monitoring dan evaluasi usaha pariwisata. Hambatan yang ada seperti keterbatasan anggaran, minimnya SDM berkompetensi khusus, kurangnya pelatihan pemasaran digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga objek wisata, menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini membutuhkan dukungan berkelanjutan.

B. Implementasi Peraturan Bupati dalam Perspektif *Siyāsah Tanfīziyah*

Siyāsah Tanfīziyah dalam khazanah pemikiran politik Islam, merupakan bagian dari *siyāsah shar'īyyah* yang membahas pelaksanaan dan penegakan kebijakan publik oleh pemerintah (*wulāt al-amr*) sesuai prinsip-prinsip syariat, kemaslahatan, dan keadilan.(Santoso et al., 2021) Istilah *tanfīziyah* sendiri mengacu pada proses eksekusi atau implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah, dengan tujuan memastikan keberlangsungan pemerintahan, perlindungan kepentingan rakyat, serta tercapainya tujuan pembangunan.(Santoso, Aprelia, et al., 2023) Dalam konteks pemerintahan daerah, *siyāsah tanfīziyah* berfungsi untuk memastikan bahwa peraturan daerah maupun kebijakan kepala daerah tidak hanya berhenti pada tataran normatif,(Santoso et al., 2020) tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan adanya kesesuaian di tingkat struktur kelembagaan, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip efektivitas dan keberlanjutan yang menjadi ruh *siyāsah tanfīziyah*. Secara normatif, pembagian tugas dan fungsi telah jelas dan sesuai dengan amanat peraturan, seperti penyusunan kebijakan teknis, koordinasi lintas pihak, fasilitasi sarana prasarana, hingga monitoring dan evaluasi usaha pariwisata. Namun, ketika masuk ke tataran implementasi, berbagai hambatan struktural maupun non-struktural masih menjadi penghalang.

Menurut konsep *siyāsah tanfīziyah*, pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat peraturan wajib memastikan bahwa setiap instrumen pelaksanaan kebijakan memiliki

dukungan sumber daya yang memadai.(Santoso, Aini, et al., 2023) Hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya SDM yang memiliki kompetensi khusus, minimnya pelatihan pemasaran digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga objek wisata menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kapasitas implementasi. Menurut teori *policy implementation gap* yang juga sejalan dengan prinsip *siyāsah tanfīziyah*, gap ini muncul karena ketidakselarasan antara perencanaan, sumber daya, dan kontrol pelaksanaan.(Santoso et al., 2024) Artinya, kebijakan yang sudah baik di atas kertas berpotensi tidak efektif jika tidak diiringi penguatan faktor pendukung.(Santoso, 2023)

Lampung Tengah sebagai daerah yang memiliki kekayaan wisata alam, budaya, buatan, dan religi membutuhkan tata kelola pariwisata yang mengedepankan prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dan perlindungan aset publik (*hifz al-māl*). Dalam perspektif *siyāsah tanfīziyah*, setiap kebijakan pariwisata tidak hanya dimaknai sebagai upaya ekonomi, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral pemerintah dalam memelihara ciptaan Allah, menjaga budaya lokal, dan memberi manfaat kepada generasi mendatang.(Santoso & Maimun, 2024) Oleh karena itu, implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah seharusnya diarahkan untuk tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Secara teoritis, *siyāsah tanfīziyah* menuntut adanya tiga pilar utama dalam implementasi kebijakan kejelasan mandat, ketersediaan sumber daya, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan.(Andiko, 2016) Berdasarkan hasil penelitian, kejelasan mandat sudah terpenuhi karena Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah memberikan rincian tugas yang spesifik bagi setiap jabatan struktural maupun kelompok substansi. Namun, ketersediaan sumber daya masih menjadi titik lemah, terutama dalam hal anggaran dan SDM yang kompeten. Mekanisme evaluasi memang telah dilakukan melalui monitoring usaha pariwisata, tetapi hasilnya belum diintegrasikan secara optimal dalam perbaikan kebijakan dan penguatan kelembagaan.

Kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan pemangku kepentingan.(Rusfi, 2014) Hal ini selaras dengan prinsip *shūrā* (musyawarah) dalam *siyāsah shar'iyah*, di mana pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi menjadi kunci keberhasilan kebijakan publik.(Muhammad, 2014, p. 11) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga objek wisata menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif masih kurang dioptimalkan. Pemerintah daerah perlu mengadopsi strategi edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap aset pariwisata.

Selain itu, perspektif *siyāsah tanfīziyah* juga menekankan pentingnya akuntabilitas (*mas'ūliyyah*) dan transparansi (*shafāfiyyah*) dalam pelaksanaan kebijakan.(Santoso, 2024) Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah seharusnya tidak hanya terfokus pada capaian fisik seperti jumlah destinasi yang dipromosikan atau jumlah event pariwisata yang digelar, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hal kualitas layanan, keberlanjutan lingkungan, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Hambatan seperti keterbatasan fasilitas, peralatan, dan infrastruktur seharusnya menjadi bagian dari laporan evaluasi publik yang transparan, sehingga masyarakat dapat memahami tantangan yang dihadapi dan turut mencari solusi bersama.

Siyāsah tanfīziyah dapat disejajarkan dengan konsep *good governance* yang meliputi efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum.(Djazuli, 2023, p. 4) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah sudah memenuhi aspek legalitas dan sebagian aspek efektivitas, tetapi masih lemah di aspek partisipasi masyarakat, efisiensi pemanfaatan anggaran, dan keberlanjutan program. Misalnya, program promosi pariwisata melalui media digital belum berjalan optimal karena keterbatasan kompetensi SDM, padahal tren pariwisata global saat ini sangat bergantung pada pemasaran digital.

Siyāsah tanfīziyah juga menggariskan pentingnya *tadbīr* (manajemen) yang proaktif dalam mengantisipasi hambatan.(Zulkarnaen, 2023, p. 8) Pemerintah daerah tidak seharusnya menunggu kendala terjadi, tetapi melakukan langkah preventif seperti perencanaan anggaran multi-tahun untuk pembangunan infrastruktur wisata, program

pelatihan SDM pariwisata yang berkelanjutan, serta penguatan jejaring kerja sama antar daerah.

Keberhasilan implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah juga sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Prinsip *ta'āwun* (kerja sama) dalam Islam mendorong agar Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata tidak bekerja sendiri, melainkan bermitra dengan Dinas Perhubungan untuk aksesibilitas, Dinas Pekerjaan Umum untuk infrastruktur, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata. Kolaborasi seperti ini akan memperkuat daya dukung kebijakan dan mempercepat pencapaian target pembangunan pariwisata.

QS. An-Nisā' ayat 58: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* (Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Quran, 2016, p. 98) Ayat ini menjadi dasar penting dalam *siyāsah tanfīziyah*, karena mengandung dua prinsip utama pemerintahan yaitu prinsip amanah yakni setiap jabatan dan fungsi harus dijalankan sesuai mandat dan kepentingan rakyat, bukan sekadar formalitas administratif. Kedua, prinsip keadilan yakni setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan harus memberi manfaat merata dan tidak menimbulkan ketimpangan.

Secara keseluruhan, implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāsah tanfīziyah*. Meskipun secara struktural pembagian tugas telah jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan berupa keterbatasan anggaran, kurangnya SDM berkompetensi khusus, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan objek wisata. QS. An-Nisā' ayat 58 menegaskan prinsip utama pemerintahan yaitu prinsip amanah yakni setiap jabatan dan fungsi harus dijalankan sesuai mandat dan kepentingan rakyat, bukan sekadar formalitas administratif. Kedua, prinsip keadilan yakni setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan harus memberi manfaat merata dan tidak menimbulkan ketimpangan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, Pertama. Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Secara struktural, pembagian tugas dan fungsi pada setiap bidang maupun kelompok substansi telah dilaksanakan sesuai peraturan, mulai dari penyusunan kebijakan teknis, koordinasi lintas pihak, fasilitasi sarana prasarana, hingga monitoring dan evaluasi usaha pariwisata. Hambatan yang ada seperti keterbatasan anggaran, minimnya SDM berkompetensi khusus, kurangnya pelatihan pemasaran digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga objek wisata, menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini membutuhkan dukungan berkelanjutan.

Kedua. Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Substansi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāsah tanfīziyah*. Meskipun secara struktural pembagian tugas telah jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan berupa keterbatasan anggaran, kurangnya SDM berkompetensi khusus, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan objek wisata. QS. An-Nisā' ayat 58 menegaskan prinsip utama pemerintahan yaitu prinsip amanah yakni setiap jabatan dan fungsi harus dijalankan sesuai mandat dan kepentingan rakyat, bukan sekadar formalitas administratif. Kedua, prinsip keadilan yakni setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan harus memberi manfaat merata dan tidak menimbulkan ketimpangan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khallaf. (2006). *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Al Anang, A., & Ismah, N. (2022). Re-Islamization of Land Law in Global Context: An Approach to Fight Ecological Scarcity. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 1–24.
- Andiko, T. (2016). Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern. *Jurnal Al Adalah*, Vol 12(1). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>
- Bapedda. (2022). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Lampung Tengah*. Pemerintah Daerah Lampung Tengah.
- Djazuli. (2023). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Prenada Media Grup.
- Edi, R. N. (2014). As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah). *Jurnal Asas*, Volume 6(2). <https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-kajian-aliran-ing.pdf>
- Hakiki, Y. R. (2022). Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. *Jurnal As-Siyasi*, 2(1), 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>
- Iqbal, M. (2007). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Gaya Media Pratama.
- Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Quran. (2016). *Al-Qur'anul Karim*. Az Ziyadah.
- Maimun, & Santoso, R. (2021). Existency Role Of The General Election Supervisory Agency In Lampung Law Enforcement Of The 2019 Election. *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 26(1). <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v16i01.235>
- Muhammad, I. (2014). *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Rahmaningsih, A. A., & Rizqi, R. (2022). Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 2(2). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>
- Ridwan. (2017). *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. FH UII Press.
- Rusfi, M. (2014). Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12(1). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>
- Santoso, R. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham Journal of Islamic Studies*, Volume 8(1).
- Santoso, R. (2023). Analisis Siyasah Tanfiziyyah Syar'iiyyah Terhadap Proses Pengusulan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Lampung Tengah Menurut Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Constitutional Law Society*, Volume 2(2). <https://doi.org/10.36448/cls.v2i2.58>
- Santoso, R. (2024). Peran Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 14 (A) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Perspektif Siyasah Tanfidziyah. *Keadilan: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Hukum*, Volume 22(2).
- Santoso, R., Aini, N., & Fauzi, M. Y. (2023). Strategy For Socialization Of The General Election Commission Of Pesawaran District To Reduce The Abstentions In The 2020 Elections In Perspective Of Fiqh Siyasah. *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 18(1). <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v18i1.300>

- Santoso, R., Aprelia, R., Nurhayati, A., & Zaharah, R. (2023). Implementation of Religious Services Policy for the Elderly in South Sumatera: Analysis of Fiqh Siyāsah Tanfidziyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 2(2). <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>
- Santoso, R., Ja'far, A. K., Majdidin, R. M., & Hidayat, T. (2024). The Construction of Islamic State Law in the 5.0 Era from the Perspective of Maqasid al-Shariah. *KnE Social Sciences*, Volume 11(1). <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14966>
- Santoso, R., & Maimun. (2024). Dynamics And Enforcement Of Election Legal Issues In Lampung Province. *DELEGA LATA*, Volume 9(1). <https://doi.org/10.30596/dll.v9i1.18060>
- Santoso, R., Mu'in, F., Fikri, A., & Shulton, H. (2021). Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih. *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1(1). <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>
- Santoso, R., Zaelani, A. Q., & Khairuddin. (2020). Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law). *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences*. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/riicmusss-19/125946231>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susandi, F. S., Husni, A., Hartono, M., & Santosa, P. E. (2023). Tingkat Infestasi Cacing Hati Pada Sapi Po Di Kelompok Tani Ternak Resa Jaya Dan Karyatani Desa Rejosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. *Jurnal Riset Dan Inovasi Peternakan (Journal of Research and Innovation of Animals)*, Volume 7(4). <https://doi.org/10.23960/jrip.2023.7.4.542-549>
- Wery Gusmansyah. (2017). Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol 2(No 2). <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>
- Yunus, M. (2023). *Tafsir Qur'an Karim*. PT Hidayakarya.
- Yusdani. (2011). *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Amara Books.
- Zulkarnaen, F. (2023). *Fiqh Siyasah di Indonesia*. Putra Surya Santoso.